PERAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL ANTARA PETUGAS DAN NARAPIDANA NARKOTIKA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PEMBINAAN DI LAPAS KELAS IIB MUARA BUNGO

Lennardo Vitto Josua T. Hutabarat[1], Herry Fernandes Butar Butar[2], Umar Anwar[3]
Bimbingan Kemasyarakatan, Jurusan Ilmu Pemasyarakatan,
Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia [1,2,3]
[1]lenardovitto@gmail.com,
[2]herryfbutar2@gmail.com, [3]umar.harun12@gmail.com

ABSTRACT

Interpersonal communication is an essential aspect of correctional guidance, because open, empathetic, and supportive communication allows officers to build trust that encourages inmates' involvement in guidance programs. This study aims to analyze the problems that arise in the implementation of guidance for narcotics inmates and the role of interpersonal communication between officers and narcotics inmates in improving the quality of guidance at the Class IIB Muara Bungo Correctional Institution. A descriptive qualitative approach was used. Data were collected through semi-structured in-depth interviews, observation, and documentation involving two correctional officers and three narcotics inmates selected purposively. The data were analyzed interactively and examined through Joseph A. DeVito's theory of interpersonal communication. The results show that guidance has not run without obstacles. The problems include psychological barriers among inmates, such as anxiety, awkwardness, and irritability in the early stage of their sentences; structural barriers, such as an imbalanced officer-inmate ratio, overcrowding, sterile hours, and shift systems; and limited facilities that affect participation, especially in self-reliance training. Despite these constraints, the five qualities of interpersonal communication, namely openness, empathy, supportiveness, positiveness, and equality, were applied through a humanistic parent-child approach, non-violent reprimands, and the use of local languages. Interpersonal communication helps officers understand inmates' conditions, builds trust and comfort, increases motivation and participation, and reaches inactive inmates. However, this role is not yet evenly distributed. Adequate time and space for private communication, special attention to passive inmates, mental health support, and stronger guidance facilities are needed.

Keywords: Interpersonal communication, quality of guidance, narcotics inmates, correctional officers, Muara Bungo

ABSTRAK

Komunikasi interpersonal menjadi aspek penting dalam pembinaan, karena komunikasi yang terbuka, empatik, dan suportif memungkinkan petugas membangun kepercayaan yang mendorong keterlibatan narapidana dalam program pembinaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika serta peran komunikasi interpersonal antara petugas dan narapidana narkotika dalam meningkatkan kualitas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semiterstruktur, observasi, dan dokumentasi terhadap dua petugas pemasyarakatan dan tiga narapidana narkotika yang dipilih secara purposif. Data dianalisis secara interaktif dan dikaji dengan teori komunikasi interpersonal Joseph A. DeVito. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan belum berjalan tanpa hambatan. Permasalahan yang ditemukan meliputi hambatan psikologis, yaitu rasa cemas, canggung, dan mudah tersinggung pada awal masa pidana; hambatan struktural, yaitu ketidakseimbangan jumlah petugas dan narapidana, kepadatan hunian, jam steril, dan sistem piket; serta keterbatasan sarana yang memengaruhi partisipasi, terutama pada pembinaan kemandirian. Di tengah keterbatasan tersebut, kelima kualitas komunikasi interpersonal, yaitu keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan, telah diterapkan melalui pendekatan humanis “orang tua dan anak”, teguran tanpa kekerasan, dan penggunaan bahasa daerah. Komunikasi interpersonal membantu petugas memahami kondisi narapidana, menumbuhkan kepercayaan dan rasa nyaman, mendorong motivasi dan partisipasi, serta menjangkau narapidana yang tidak aktif. Namun, peran tersebut belum merata. Diperlukan waktu dan ruang komunikasi pribadi yang memadai, perhatian khusus bagi narapidana yang pasif, dukungan tenaga kesehatan jiwa, dan penguatan sarana pembinaan.

Kata Kunci: Komunikasi interpersonal, kualitas pembinaan, narapidana narkotika, petugas pemasyarakatan, Lapas Muara Bungo

A. Pendahuluan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana di Indonesia yang berperan dalam pelaksanaan pidana, khususnya penyelenggaraan pembinaan terhadap narapidana (Ritonga & Soponyono, 2023). Lapas tidak hanya menjadi tempat menjalani pidana penjara, tetapi juga institusi yang bertanggung jawab mendukung perbaikan diri dan mempersiapkan narapidana agar dapat kembali berperan dalam kehidupan bermasyarakat (Jarodi, 2023). Orientasi tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menempatkan peningkatan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan sebagai bagian penting dari sistem pemasyarakatan.

Pembinaan di Lapas mencakup pembinaan kepribadian, yang diarahkan pada kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual, kesadaran hukum, serta sikap dan perilaku positif, dan pembinaan kemandirian, yang membekali narapidana dengan keterampilan kerja. Keberhasilan pembinaan tidak cukup diukur dari terselenggaranya kegiatan sesuai jadwal. Kualitas pembinaan juga

tampak dari kesesuaian program dengan kebutuhan warga binaan, pemahaman terhadap tujuan kegiatan, keterlibatan dalam proses pembinaan, dan perkembangan sikap. Karena itu, kualitas interaksi antara petugas dan narapidana menjadi aspek yang relevan, dan salah satu penentu utamanya adalah komunikasi interpersonal (Zulfedryan & Santoso, 2025).

Menurut DeVito (2017), komunikasi interpersonal adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau kelompok kecil dengan efek dan umpan balik langsung (Riduan & Aminudin, 2025). Efektivitasnya dapat dikaji melalui lima kualitas, yaitu keterbukaan (*openness*), empati (*empathy*), sikap mendukung (*supportiveness*), sikap positif (*positiveness*), dan kesetaraan (*equality*) (Nabila & Avina, 2024). Komunikasi tatap muka dipandang paling efektif untuk memengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku karena berlangsung dialogis dan timbal balik (Effendi, 2003). Komunikasi yang jelas dan persuasif membantu narapidana memahami tujuan pembinaan dan mendorong partisipasi aktif (Setiawan & Rohayati, 2026).

Persoalan ini semakin relevan pada narapidana narkotika. Mereka memiliki latar belakang, peran dalam tindak pidana, pengalaman penggunaan narkotika, dan kondisi psikologis yang beragam. Pada fase awal, narapidana narkotika rentan mengalami kecemasan dan tekanan emosional sehingga membutuhkan figur yang memberi rasa aman, dan kehadiran figur otoritas yang suportif dapat menjadi *secure base* bagi stabilitas emosional mereka (Apriliansyah & Butar, 2025). Komunikasi interpersonal dapat membantu menyampaikan informasi, mengenali kendala, dan berkoordinasi dengan tenaga profesional, tetapi tidak menggantikan intervensi medis atau psikologis.

Lapas Kelas IIB Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, menyelenggarakan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Berdasarkan rekapitulasi tahun 2025 dari Tata Usaha Lapas, jumlah penghuni tercatat 382 orang dan 202 orang di antaranya (sekitar 52,9%) merupakan narapidana perkara narkotika. Keikutsertaan pada program pembinaan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Rekapitulasi Jumlah Narapidana dan Peserta Pembinaan Lapas Kelas IIB Muara Bungo

Uraian	Jumlah
Narapidana Lapas Kelas IIB Muara Bungo	382 orang
Narapidana perkara narkotika	202 orang
Pembinaan kepribadian: Halaqoh	126 orang
Pembinaan kepribadian: *One Day One Juz* dan Tahfiz	30 orang
Pembinaan kepribadian: kegiatan Gereja	15 orang
Pembinaan kemandirian: hortikultura	6 orang
Pembinaan kemandirian: pangkas rambut	1 orang
Pembinaan kemandirian: *laundry*	3 orang
Pembinaan kemandirian: tata boga	2 orang
Pembinaan kemandirian: papan bunga	1 orang
Pembinaan kemandirian: pengelasan	5 orang
Pembinaan kemandirian: pertukangan	5 orang

Sumber: Tata Usaha Lapas Kelas IIB Muara Bungo (2025)

Tabel 1 memperlihatkan bahwa keikutsertaan pada pembinaan kepribadian jauh lebih banyak daripada pembinaan kemandirian. Meskipun berbagai program telah diselenggarakan, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan, seperti keterbatasan jumlah petugas dibandingkan jumlah warga binaan, perbedaan status, stigma negatif, dan keterbatasan sarana, yang membuat interaksi petugas dan narapidana tidak selalu dapat dilakukan secara intensif. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal yang efektif antara petugas dan narapidana dapat meningkatkan keberhasilan pembinaan, menciptakan ketertiban, dan mengurangi potensi konflik (Penisa et al., 2024). Namun, kajian yang secara khusus membahas peran komunikasi interpersonal petugas dan narapidana narkotika dalam meningkatkan kualitas pembinaan masih terbatas.

Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika dan (2) menganalisis peran komunikasi interpersonal antara petugas dan narapidana narkotika dalam meningkatkan kualitas pembinaan di Lapas Kelas IIB Muara Bungo. Secara teoretis, hasilnya diharapkan memperkaya kajian komunikasi interpersonal dalam konteks pemasyarakatan. Secara praktis, hasilnya diharapkan menjadi masukan bagi lembaga dan petugas untuk memperkuat komunikasi dalam pembinaan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis

deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada interaksi sosial, pengalaman, perilaku, dan makna komunikasi dalam lingkungan pemasyarakatan, dan bertujuan memahami masalah sosial melalui gambaran yang menyeluruh dalam latar alamiah (Creswell, 2014). Penelitian dilaksanakan di Lapas Kelas IIB Muara Bungo yang dipilih secara purposif karena menampung narapidana narkotika yang berinteraksi langsung dengan petugas dalam pembinaan sehari-hari. Penelitian berlangsung sekitar lima bulan, dari Juni sampai Oktober 2026.

Informan dipilih dengan teknik *purposive sampling* dan berjumlah lima orang, yaitu dua petugas pemasyarakatan (Bapak Parman dan Bapak Arbiy) serta tiga narapidana narkotika yang disebut dengan inisial LW, AS, dan GS. Petugas dipilih karena berperan langsung dalam pembinaan dan pengawasan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam semiterstruktur dengan pedoman wawancara, yang menggali bentuk komunikasi interpersonal, cara membangun kedekatan, hambatan, upaya menciptakan komunikasi efektif, dan dampaknya. Peneliti juga melakukan observasi terhadap interaksi petugas dan narapidana. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi Lapas, data pembinaan, foto kegiatan, peraturan perundang-undangan, serta studi kepustakaan.

Pengolahan data dilakukan melalui pemeriksaan, pengelompokan berdasarkan tema, penyusunan, dan penafsiran data. Analisis menggunakan model interaktif Miles et al. (2014), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi melalui perbandingan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dianalisis dengan teori komunikasi interpersonal DeVito (2017) yang terdiri atas keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian disajikan menurut dua rumusan masalah, yaitu permasalahan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika dan peran komunikasi interpersonal dalam meningkatkan kualitas pembinaan. Setiap temuan dibahas dengan teori DeVito dan hasil penelitian terdahulu.

1. Permasalahan dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika

Pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika di Lapas Kelas IIB Muara Bungo belum berjalan tanpa hambatan. Hasil wawancara dan observasi menunjukkan hambatan yang bersumber dari kondisi psikologis narapidana, keterbatasan kelembagaan, karakteristik kognitif dan latar bahasa, serta keterbatasan sarana yang memengaruhi partisipasi.

a. Kondisi psikologis narapidana pada awal masa pidana

Salah satu kendala utama bersumber dari karakter narapidana narkotika yang beragam. Bapak Arbiy menjelaskan bahwa narapidana narkotika "memiliki karakter yang berbeda-beda, ada yang terbuka dan sangat tertutup pada awalnya" serta "mudah tersinggung karena masih ada pengaruh obat maupun dampak kecemasan sebagai pengguna", sehingga pendekatan harus bertahap dan tidak memaksakan. Hal ini dirasakan langsung oleh LW: "Pertama kali datang ke sini agak takut, grogi, ada rasa cemas dan kaku." Pak AS juga merasa canggung karena status sebagai narapidana sehingga lebih memilih diam ketika merasa bosan atau suntuk.

Temuan ini menunjukkan bahwa pesan pembinaan sulit diterima ketika penerima pesan sedang cemas dan menarik diri, sehingga narapidana perlu melewati fase adaptasi emosional terlebih dahulu. Kecemasan tersebut tidak permanen, karena LW berangsur nyaman setelah saling mengenal dan terbiasa. Namun, penopang psikologis di Lapas Muara Bungo masih bertumpu pada keramahan dan kepekaan individu petugas, sedangkan dukungan tenaga ahli kesehatan jiwa belum tersedia secara tetap. Hal ini penting karena figur otoritas yang suportif dapat menjadi *secure base* bagi stabilitas emosional narapidana (Apriliansyah & Butar, 2025), sementara stigma negatif terhadap narapidana dapat memperlebar jarak komunikasi (Setiawan & Rohayati, 2026).

b. Keterbatasan rasio petugas, waktu, dan ruang komunikasi

Jumlah warga binaan yang mencapai 382 orang tidak sebanding dengan jumlah petugas. Pak AS menuturkan bahwa petugas "tidak mungkin bisa memperhatikan semuanya satu per satu" sehingga warga binaan harus berinisiatif sendiri,

dan biasanya hanya bercerita kepada petugas yang sudah dikenal, misalnya karena satu kampung. Jam steril dan jadwal piket juga membatasi kesempatan berkomunikasi. Bapak Parman menyiasatinya dengan membagi pembinaan kelompok menjadi lima kelompok yang masing-masing diketuai warga binaan yang telah dilatih. Komunikasi kepada petugas umumnya melalui ketua kelompok, tetapi warga binaan tetap dapat datang langsung untuk berkonsultasi tentang masalah agama, keluarga, atau pribadi.

Pembinaan kelompok merupakan solusi realistis atas keterbatasan personel, tetapi membuat komunikasi sebagian besar berjalan tidak langsung. Pendekatan personal baru dilakukan ketika narapidana sudah menunjukkan kecemasan atau stres berat, sehingga bersifat reaktif, bukan pencegahan. Sikap sebagian petugas yang terlalu menjaga wibawa juga membuat narapidana ragu memulai pertanyaan. Temuan ini sejalan dengan Setiawan dan Rohayati (2026) yang mengidentifikasi keterbatasan jumlah petugas dan minimnya ruang komunikasi privat sebagai hambatan komunikasi interpersonal di lapas. Karena akar masalahnya bersifat kelembagaan, kebijaksanaan individu petugas saja belum cukup. Pembinaan kelompok perlu diimbangi jadwal konsultasi pribadi di luar jam steril.

c. Daya tangkap dan latar bahasa

Bapak Parman menilai daya tangkap narapidana narkotika berbeda dibandingkan narapidana lain karena proses berpikirnya cenderung lebih lama, sehingga komunikasi dan pola pembelajaran khusus perlu ditingkatkan, idealnya bersama psikiater atau dokter. Mardiansyah dan Santoso (2025) menegaskan bahwa penyesuaian gaya komunikasi dengan kemampuan menangkap pesan merupakan bagian penting dalam rehabilitasi narapidana narkotika.

Latar bahasa turut memengaruhi. Bapak Arbiy memakai bahasa daerah narapidana baru pada saat perkenalan agar percakapan lebih nyambung. Bahasa daerah berfungsi sebagai jembatan emosional yang mengurangi rasa asing, tetapi efektivitasnya terbatas karena Lapas dihuni warga binaan dari berbagai daerah. Narapidana yang kurang fasih berbahasa Indonesia atau tidak memahami

bahasa daerah petugas berisiko salah paham terhadap instruksi dan merasa terisolasi. Petugas perlu memakai bahasa Indonesia yang sederhana dengan tempo pelan, memberi contoh langsung, memanfaatkan bahasa tubuh, meminta narapidana mengulang instruksi, dan memetakan latar bahasa saat registrasi.

d. Ketimpangan partisipasi dan keterbatasan sarana

Berdasarkan Tabel 1, keikutsertaan tercatat pada pembinaan kepribadian mencapai 171 orang (Halaqoh 126, *One Day One Juz* dan Tahfiz 30, dan kegiatan gereja 15), sedangkan pada tujuh kegiatan kemandirian hanya 23 orang. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyebabnya tidak hanya minat. GS menyebut gangguan fasilitas di blok hunian: “Seharusnya kalau sedang ada acara pembinaan, TV dimatikan saja agar orang-orang tergerak untuk ikut pembinaan di masjid.” Bapak Arbiy menyampaikan bahwa petugas memotivasi dengan menjelaskan hak remisi dan premi kerja serta memberi pujian atau makanan dan minuman, tetapi anggaran sarana kerja, terutama sektor pertanian, masih diperlukan.

Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi persuasif petugas belum berdampak optimal tanpa dukungan sarana yang memadai dan pengaturan lingkungan hunian yang mendukung. Pembinaan kemandirian sendiri dimaksudkan membekali narapidana dengan keterampilan untuk kehidupan setelah bebas (Jarodi, 2023), sehingga rendahnya partisipasi pada program ini perlu mendapat perhatian.

e. Pendekatan humanis sebagai faktor penyeimbang

Di tengah keterbatasan tersebut, pembinaan tetap berjalan karena petugas menerapkan pendekatan humanis ala “orang tua dan anak”. GS menuturkan bahwa saat pertama masuk ia disambut ramah, dan “Saya memposisikan diri sebagai anak dan petugas sebagai orang tua. Di sini saya merasa dihormati sebagai manusia. Ketika melakukan kesalahan kami ditegur, tetapi tidak pernah ada main fisik.” Pendekatan ini memiliki batas. Bapak Arbiy mengingatkan bahwa komunikasi harus “tegas tetapi tetap humanis” dan keakraban tidak boleh membuat narapidana “mencari celah melanggar aturan”.

Secara keseluruhan, hambatan pembinaan saling berkaitan: hambatan psikologis memperlebar jarak komunikasi, hambatan struktural mempersempit ruang interaksi personal, dan hambatan sarana memengaruhi partisipasi. Pendekatan humanis menjaga suasana tetap kondusif, tetapi belum menyelesaikan akar masalah struktural.

2. Peran Komunikasi Interpersonal dalam Meningkatkan Kualitas Pembinaan

Peran komunikasi interpersonal dianalisis dengan lima kualitas DeVito (2017). Ringkasan penerapannya disajikan pada Tabel 2.

a. Keterbukaan (*openness*)

Keterbukaan petugas tampak dari penyampaian aturan dan program pembinaan sejak narapidana masuk. Bapak Arbiy menegaskan bahwa informasi tersebut “harus disampaikan secara terbuka”, dan GS mengaku membaca hak dan kewajibannya ketika pertama kali masuk. Keterbukaan narapidana tumbuh kemudian. LW mengatakan, “Setelah mulai saling mengenal dan sudah terbiasa, saya mulai merasa nyaman. Kalau sudah kenal, saya bisa bercerita lebih terbuka.” Bapak Parman menilai kebanyakan warga binaan cukup terbuka karena membutuhkan tempat mengadu, sedangkan Bapak Arbiy menyebut bahwa pada awalnya banyak yang tertutup. Keterbukaan itu selektif. GS menyatakan, “Tidak semua masalah saya ceritakan kepada petugas”, dan Pak AS lebih mudah menyampaikan keluhan kepada sesama warga binaan.

Keterbukaan karenanya bersifat dua arah dengan pola berbeda. Petugas relatif mudah menyampaikan informasi formal, sedangkan keterbukaan narapidana membutuhkan kepercayaan. Komunikasi antarnarapidana dapat menjadi ruang berbagi pengalaman dan dukungan (Alber Nurfajri, 2021), terutama bagi mereka yang belum siap terbuka kepada petugas. Keterbukaan yang terbatas tidak selalu berarti kegagalan, karena DeVito (2017) menekankan keterbukaan yang sesuai dengan konteks hubungan, sehingga privasi narapidana perlu dihormati.

b. Empati (*empathy*)

Empati petugas tampak dari perhatian terhadap kondisi emosional narapidana. Bapak Parman menjelaskan bahwa narapidana yang cemas, stres, atau takut dipanggil

secara pribadi, lalu bila perlu digabungkan dengan kelompoknya agar memperoleh hiburan dan dukungan teman. Ketika ada musibah keluarga, petugas membantu dengan cuti mengunjungi keluarga, kesempatan menelepon, atau doa bersama. Bapak Arbiy menambahkan bahwa warga binaan yang bermasalah atau berduka dapat dikenali "dari tingkah lakunya dan raut mukanya", lalu ditanyai. Pak AS dan LW membenarkan bahwa petugas menanyakan kabar dan perasaan mereka.

Dengan demikian, petugas tidak hanya memandang narapidana dari sisi pelanggaran, tetapi juga memahami keadaan yang melatarbelakangi perilakunya. Namun, Pak AS menyebut petugas tidak langsung menggali masalah pribadi secara mendalam, dan intensitas interaksi yang terbatas membuat kondisi narapidana yang pasif berpotensi tidak teridentifikasi.

c. Sikap mendukung (*supportiveness*)

Dukungan diberikan dalam bentuk dukungan moral, pujian, nasihat, perhatian, dan arahan bidang kerja. Bapak Parman menyatakan bahwa petugas memberi semangat "supaya mereka tidak terlalu tegang selama berada di sini". Bapak Arbiy menyebut apresiasi dapat berupa makanan atau minuman, "intinya mereka merasa bahwa hasil kerja mereka diperhatikan dan dihargai". LW merasakan dukungan berupa semangat dan perhatian, sedangkan Pak AS mengingat nasihat agar bersabar dan memperbanyak ibadah. Dukungan juga hadir melalui kelompok, karena sesama anggota dapat menghibur. GS tetap berharap adanya dorongan langsung dari petugas untuk mengajak dan memberi contoh agar warga binaan ikut pembinaan.

Sikap mendukung membantu narapidana merasa aman menyampaikan pendapat atau masalah, sehingga lebih nyaman dan termotivasi mengikuti pembinaan. Namun, dukungan ini masih terbatas oleh sarana pembinaan, terutama untuk kegiatan kemandirian.

d. Sikap positif (*positiveness*)

Sikap positif tampak dari penghargaan terhadap usaha narapidana, motivasi, dan cara menegur. Bapak Arbiy menekankan bahwa "petugas memang harus tegas, tetapi tetap harus manusiawi" agar narapidana berubah dan kembali ke

masyarakat dengan baik. Bapak Parman melihat sisi baik pembinaan berkelompok karena narapidana "bisa bersaing dalam hal-hal yang positif", misalnya menghafal Al-Qur'an atau berkhotbah. GS menyampaikan bahwa ketika ia melakukan kesalahan, petugas menegur tetapi tidak pernah melakukan kekerasan fisik. GS juga menduga petugas lebih mudah mengarahkan warga binaan yang aktif mengikuti kegiatan keagamaan.

Sikap positif membuat narapidana merasa dihargai dan tidak semata-mata dipandang dari kasusnya. Namun, pernyataan GS menandakan risiko, yakni narapidana yang jarang mengikuti kegiatan lebih sulit dijangkau dan diarahkan. Kelompok ini justru memerlukan pendekatan yang lebih aktif.

e. Kesetaraan (*equality*)

Kesetaraan di sini tidak menghapus perbedaan peran. Bapak Arbiy mengatakan bahwa petugas tetap harus menghargai narapidana sebagai manusia dan memanggil dengan namanya setelah saling kenal. GS merasa dihormati sebagai manusia. LW menilai yang terpenting adalah saling menghargai dan tidak menghakimi, sedangkan Pak AS menyebut petugas akan menghargai selama narapidana sopan dan tidak melanggar aturan. Meski demikian, perbedaan status dan wibawa petugas masih menimbulkan rasa canggung pada sebagian narapidana.

Tabel 2 Penerapan Lima Kualitas Komunikasi Interpersonal

Kualitas	Penerapan dan kendala
Keterbukaan	*Penerapan:* aturan dan program disampaikan terbuka; narapidana bercerita setelah akrab dan percaya. *Kendala:* takut, malu, dan segan di awal; tidak semua masalah diceritakan.
Empati	*Penerapan:* memanggil secara pribadi, bertanya bila raut berubah, cuti atau telepon keluarga, doa bersama. *Kendala:* masalah pribadi tidak langsung digali; interaksi terbatas.
Sikap mendukung	*Penerapan:* dukungan moral, pujian, nasihat, arahan bidang kerja, penjelasan remisi dan premi. *Kendala:* sarana terbatas; dorongan langsung masih diharapkan.
Sikap positif	*Penerapan:* apresiasi hasil kerja, semangat, persaingan sehat, teguran tanpa kekerasan. *Kendala:* narapidana yang jarang ikut kegiatan sulit diarahkan.
Kesetaraan	*Penerapan:* dihargai sebagai manusia, dipanggil dengan nama, tidak dihakimi. *Kendala:* perbedaan status dan wibawa petugas membuat canggung.

Sumber: Data primer yang diolah peneliti (2026)

f. Peran dan batasan komunikasi interpersonal

Berdasarkan kelima kualitas tersebut, komunikasi interpersonal berperan (1) membantu petugas mengetahui kondisi dan permasalahan narapidana sebagai dasar menentukan pendekatan pembinaan, (2) menumbuhkan kepercayaan dan rasa nyaman, (3) mendorong motivasi, partisipasi, dan sikap tertib, serta (4) menjangkau narapidana yang tidak aktif datang sendiri, berdampingan dengan pembinaan kelompok. Hasil ini sejalan dengan temuan bahwa komunikasi interpersonal yang efektif mendukung keberhasilan pembinaan, ketertiban, dan berkurangnya konflik (Penisa et al., 2024) serta membantu petugas menjalankan perannya dalam pembinaan (Zulfedryan & Santoso, 2025).

Namun, peran tersebut belum merata. Keterbukaan belum terbentuk pada semua narapidana, dan kedekatan cenderung lebih mudah terjalin dengan narapidana yang aktif mengikuti kegiatan. Narapidana yang pasif atau lebih banyak berada di kamar berisiko kurang terjangkau, padahal merekalah yang paling membutuhkan pendekatan. Dampak komunikasi terhadap partisipasi pada pembinaan kemandirian juga masih terbatas. Karena itu, kualitas pembinaan tidak boleh bergantung pada kebijaksanaan individu petugas semata, tetapi perlu ditopang waktu dan ruang komunikasi, tenaga ahli, dan sarana yang memadai.

3. Usulan Program

Atas dasar temuan tersebut, peneliti merumuskan usulan program “SAPA Admisi” (Sambutan, Pendampingan, dan Adaptasi Warga Binaan Narkotika pada Masa Admisi dan Orientasi). Program dimulai pada masa admisi karena narapidana paling rentan sekaligus paling terbuka untuk dibimbing, dan terdiri atas enam komponen, yaitu penyambutan humanis dan orientasi terstruktur, penguatan psikologis melalui skrining dan konseling, petugas pendamping dan pendamping sebaya, Jam Sapa berupa konsultasi terjadwal di luar jam steril, penyesuaian materi dan dukungan tenaga ahli, serta pengenalan program pembinaan dan pemetaan minat. Program ini memperkuat pendekatan humanis, pembinaan berkelompok, dan bahasa daerah yang sudah ada, sekaligus menutup celah berupa kedekatan

yang bergantung pada kebetulan dan pendekatan personal yang reaktif.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika di Lapas Kelas IIB Muara Bungo belum berjalan tanpa hambatan. Permasalahan yang ditemukan saling berkaitan dan dapat dikelompokkan menjadi hambatan psikologis pada diri narapidana, hambatan struktural kelembagaan berupa ketidakseimbangan jumlah petugas dan narapidana, kepadatan hunian, jam steril, dan sistem piket, serta hambatan sarana yang memengaruhi partisipasi, terutama pada pembinaan kemandirian. Petugas menyikapinya dengan pendekatan humanis “orang tua dan anak”, teguran tanpa kekerasan, dan penggunaan bahasa daerah, tetapi pendekatan ini memiliki batas dan masih bergantung pada kepekaan masing-masing petugas.

Komunikasi interpersonal berperan dalam meningkatkan kualitas pembinaan. Kelima kualitas DeVito, yaitu keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan, telah diterapkan. Komunikasi interpersonal membantu petugas memahami kondisi narapidana, menumbuhkan kepercayaan dan rasa nyaman, mendorong motivasi dan partisipasi, serta menjangkau narapidana yang tidak aktif. Namun, peran tersebut belum merata karena keterbukaan belum terbentuk pada semua narapidana dan dampaknya terhadap pembinaan kemandirian masih terbatas.

Lapas disarankan menyediakan waktu dan ruang komunikasi pribadi yang lebih memadai, misalnya konsultasi rutin di luar jam steril, memberi perhatian khusus kepada narapidana yang pasif, bekerja sama dengan psikiater, dokter, atau psikolog, mengatur lingkungan hunian, serta mencatat latar bahasa narapidana saat registrasi. Petugas disarankan menjaga keseimbangan antara wibawa dan keramahan tanpa mengabaikan batas peran. Penelitian ini terbatas pada satu lapas dengan lima informan, sehingga penelitian selanjutnya disarankan melibatkan lebih banyak informan, termasuk narapidana dari luar daerah, menggunakan metode kuantitatif atau campuran untuk mengukur pengaruh komunikasi interpersonal terhadap kualitas pembinaan, serta membandingkan beberapa lapas.

DAFTAR PUSTAKA

Alber Nurfajri, M. S. (2021). Hubungan komunikasi interpersonal antar narapidana perempuan dalam merestorasi mental di dalam Lapas Perempuan Kelas II B Bengkulu. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9*(3), 9. doi:10.23887/jpku.v9i3.40607

Apriliansyah, R., & Butar, H. F. B. (2025). Dukungan keluarga sebagai upaya narapidana beradaptasi di Rutan Kelas IIB Takengon. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4027–4036.

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.

DeVito, J. A. (2017). *The interpersonal communication book*. Boston, MA: Pearson.

Effendi, O. U. (2003). *Ilmu komunikasi: Teori dan praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Jarodi, S. F. O. (2023). Pelaksanaan pembinaan kemandirian guna meningkatkan keterampilan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. *Intelektualita, 12*(2). doi:10.19109/intelektualita.v12i02.19467

Mardiansyah, R. D., & Santoso, I. (2025). Teknik komunikasi interpersonal dalam program rehabilitasi sosial narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Al-Zayn, 3*(4), 4508–4522.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.

Nabila, J., & Avina, D. G. (2024). Efektivitas komunikasi interpersonal pustakawan di UPT Perpustakaan Universitas Andalas. *Media Pustakawan, 31*(2), 209–223. doi:10.37014/medpus.v31i2.5236

Penisa, A. M., Asta, G., Lofita, H., & Sitorus, L. E. V. (2024). Optimalisasi peran petugas lembaga pemasyarakatan dalam menangani konflik antar narapidana demi kesejahteraan psikologis di lembaga pemasyarakatan Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice, 1*(4), 9. doi:10.47134/ijlj.v1i4.2831

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*.

Riduan, M., & Aminudin, A. (2025). Efektivitas komunikasi interpersonal orang tua dalam mengatasi efek negatif penggunaan smartphone pada anak sekolah SDN Gajahrejo 01. *Jurnal Al-Qolamuna: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, 2*(3), 275–287.

Ritonga, B. Z., & Soponyono, E. (2023). Pembentukan lembaga pelaksana pidana sebagai wujud sistem peradilan pidana integral. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 5*(1), 136–153. doi:10.14710/jphi.v5i1.136-153

Setiawan, M. D., & Rohayati, A. C. (2026). Analisis komunikasi interpersonal petugas pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana residivis di Lapas Kelas I Palembang. *J-CEKI: Jurnal*

Cendekia Ilmiah, 5(2), 95–108. doi:10.56799/jceki.v5i2.12446

Zulfedryan, M., & Santoso, I. (2025). Peran petugas pemasyarakatan dalam proses resosialisasi narapidana guna keberhasilan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Balikpapan. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Al-Zayn, 3*(5), 5882. doi:10.61104/alz.v3i5.2247